



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Jakarta Selatan
Telp. (021) 5221618/ Fax. (021) 5265480

Nomor : PPE.PP.04.03-2845
Lampiran : 1 (satu) dokumen
Hal : Penyampaian Pembagian Wilayah Kerja (Zonasi) Tahun 2023

28 Desember 2022

Yth. Kepala Kantor Wilayah

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Barat

di

Tempat

Sehubungan dengan usulan pembagian wilayah kerja (zonasi) Perancang Peraturan Perundang-undangan Tahun 2023 dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Barat, bersama ini kami sampaikan Keputusan Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan tentang Pembagian Wilayah Kerja (Zonasi) Perancang Peraturan Perundang-undangan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Barat Tahun 2023 yang penetapannya berdasarkan:

- a. pembagian wilayah kerja (zonasi) Perancang Peraturan Perundang-undangan disesuaikan dengan jumlah wilayah kerja pada masing-masing Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan dilakukan perputaran dengan mempertimbangkan usulan pembagian wilayah kerja (zonasi) dan Keputusan Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan tentang Pembagian Wilayah Kerja (Zonasi) Perancang Peraturan Perundang-undangan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020 dan Tahun 2021; dan
- b. Perancang Peraturan Perundang-undangan melaksanakan tugas pada wilayah kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berjumlah paling sedikit 3 (tiga) orang agar pelaksanaan tugas pembentukan peraturan perundang-undangan di provinsi atau kabupaten/kota terlaksana secara optimal dan proporsional.

Demikian, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Plt. Direktur Jenderal
Peraturan Perundang-undangan,



Dr. Dhahana Putra
NIP 19690909 199303 1 001



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
NOMOR PPE.2755.PP.04.03 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBAGIAN WILAYAH KERJA (ZONASI)
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
DI KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
NUSA TENGGARA BARAT
TAHUN 2023

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan pembentukan Peraturan Perundang-undangan di daerah yang berkualitas, perlu mengikutsertakan Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam setiap tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di daerah;
 - b. bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas pembentukan Peraturan Perundang-undangan di daerah oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan secara proporsional sesuai dengan jenjang ahli, perlu dilakukan perputaran atau rotasi pembagian wilayah kerja (zonasi) Perancang Peraturan Perundang-undangan setiap 1 (satu) tahun sekali;
 - c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum bagi Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam melakukan tugas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di daerah, perlu ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal Peraturan

Perundang-undangan tentang Pembagian Wilayah Kerja (Zonasi) Perancang Peraturan Perundang-undangan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan tentang Pembagian Wilayah Kerja (Zonasi) Perancang Peraturan Perundang-undangan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Barat Tahun 2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5729);
 3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang Dibentuk di Daerah oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1133 Tahun 2018);
 4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor

Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1441);

5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1365);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG PEMBAGIAN WILAYAH KERJA (ZONASI) PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2023.

KESATU : Membagi wilayah kerja (zonasi) Perancang Peraturan Perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Perancang Peraturan Perundang-undangan adalah melakukan:


1. pembentukan Peraturan Perundang-undangan di daerah;
2. penyusunan instrumen hukum lainnya;
3. pemetaan Peraturan Daerah; dan
4. mediasi dan konsultasi.

KETIGA : Dalam hal terdapat beban kinerja tinggi pada suatu wilayah kerja (zonasi), Perancang Peraturan Perundang-undangan di luar wilayah kerja (zonasi) dapat melaksanakan tugas di luar wilayah kerja (zonasi) yang telah ditetapkan dalam Keputusan ini berdasarkan surat perintah Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan menyampaikan surat perintah tersebut kepada Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan.

- KEEMPAT : Kegiatan yang dilakukan oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan di luar wilayah kerja (zonasi) tetap dapat diperhitungkan sebagai hasil kerja.
- KELIMA : Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dipandang mampu melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA.
- KEENAM : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Barat.
- KETUJUH : Keputusan Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 22 Desember 2022

Plt. DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN,

Dr. DHAHANA PUTRA
NIP. 19690909 199303 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
3. Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Barat; dan
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Lampiran : PPE.2755.PP.04.03 TAHUN 2022
Tanggal : 22 Desember 2022

PEMBAGIAN WILAYAH KERJA (ZONASI)
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
DI KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
NUSA TENGGARA BARAT
TAHUN 2023

No	Nama	Wilayah Kerja	Jenjang
1.	Suyanto Edi Wibowo	Provinsi Nusa Tenggara Barat	1) Ahli Madya (Suyanto Edi Wibowo) 2) Ahli Muda (Jupriadi Putra) 3) Ahli Muda (Taufan Arisandy) 4) Ahli Muda (Ni Ketut Citrawati) 5) Ahli Muda (Zelis Febriani) 6) Ahli Pertama (Hermi Sari BN)
		Kota Mataram	1) Ahli Madya (Suyanto Edi Wibowo) 2) Ahli Muda (Ni Ketut Citrawati) 3) Ahli Muda (Pahittiartik) 4) Ahli Pertama (Fathin Rodada) 5) Ahli Pertama (Riki Aditya)
		Kabupaten Lombok Barat	1) Ahli Madya (Suyanto Edi Wibowo) 2) Ahli Muda (Pahittiartik) 3) Ahli Muda (Khairuddin) 4) Ahli Muda (Baiq Rara Charina) 5) Ahli Pertama (Nyoman Daivi Prakitri Utami)
		Kabupaten Sumbawa Barat	1) Ahli Madya (Suyanto Edi Wibowo) 2) Ahli Muda (Pahittiartik) 3) Ahli Muda (Baiq Rara Charina) 4) Ahli Pertama (Rio Dwi Nugroho) 5) Ahli Pertama (Nyoman Daivi Prakitri Utami)
		Kabupaten Sumbawa	1) Ahli Madya (Suyanto Edi Wibowo) 2) Ahli Muda (Taufan Arisandy) 3) Ahli Muda (Khairuddin) 4) Ahli Muda (Baiq Rara Charina) 5) Ahli Pertama (Riki Aditya) 6) Ahli Pertama (Hermi Sari BN)
		Kabupaten Bima	1) Ahli Madya (Suyanto Edi Wibowo) 2) Ahli Muda (Taufan Arisandy) 3) Ahli Muda (Ni Ketut Citrawati) 4) Ahli Muda (Zelis Febriani) 5) Ahli Pertama (Riki Aditya)
2.	Jupriadi Putra	Provinsi Nusa Tenggara Barat	1) Ahli Madya (Suyanto Edi Wibowo) 2) Ahli Muda (Jupriadi Putra) 3) Ahli Muda (Taufan Arisandy) 4) Ahli Muda (Ni Ketut Citrawati) 5) Ahli Muda (Zelis Febriani) 6) Ahli Pertama (Hermi Sari BN)
		Kabupaten Lombok Utara	1) Ahli Muda (Jupriadi Putra) 2) Ahli Muda (Zelis Febriani) 3) Ahli Muda (Khairuddin) 4) Ahli Muda (Sitti Afina Desi Suryantini) 5) Ahli Pertama (Fathin Rodada) 6) Ahli Pertama (Ahmad Muzayyin)
		Kabupaten Dompu	1) Ahli Muda (Jupriadi Putra) 2) Ahli Muda (Ni Ketut Citrawati)

			3) Ahli Muda (Sitti Afina Desi Suryantini)
			4) Ahli Pertama (Fathin Rodada)
			5) Ahli Pertama (Rio Dwi Nugroho)
			6) Ahli Pertama (Ahmad Muzayyin)
		Kota Bima	1) Ahli Muda (Jupriadi Putra)
			2) Ahli Muda (Pahittiartik)
			3) Ahli Muda (Sitti Afina Desi Suryantini)
			4) Ahli Pertama (Rio Dwi Nugroho)
			5) Ahli Pertama (Prayogi Simatupang)
			6) Ahli Pertama (Muhammad Fitrahurrahman Gaffar)
3.	Taufan Arisandy	Provinsi Nusa Tenggara Barat	1) Ahli Madya (Suyanto Edi Wibowo)
			2) Ahli Muda (Jupriadi Putra)
			3) Ahli Muda (Taufan Arisandy)
			4) Ahli Muda (Ni Ketut Citrawati)
			5) Ahli Muda (Zelis Febriani)
			6) Ahli Pertama (Hermi Sari BN)
		Kabupaten Lombok Timur	1) Ahli Muda (Taufan Arisandy)
			2) Ahli Muda (Khairuddin)
			3) Ahli Muda (Baiq Rara Charina)
			4) Ahli Pertama (Nyoman Daivi Prakriti Utami)
			5) Ahli Pertama (Prayogi Simatupang)
			6) Ahli Pertama (Muhammad Fitrahurrahman Gaffar)
		Kabupaten Sumbawa	1) Ahli Madya (Suyanto Edi Wibowo)
			2) Ahli Muda (Taufan Arisandy)
			3) Ahli Muda (Khairuddin)
			4) Ahli Muda (Baiq Rara Charina)
			5) Ahli Pertama (Hermi Sari BN)
			6) Ahli Pertama (Riki Aditya)
		Kabupaten Bima	1) Ahli Madya (Suyanto Edi Wibowo)
			2) Ahli Muda (Taufan Arisandy)
			3) Ahli Muda (Ni Ketut Citrawati)
			4) Ahli Muda (Zelis Febriani)
			5) Ahli Pertama (Riki Aditya)
4.	Ni Ketut Citrawati	Provinsi Nusa Tenggara Barat	1) Ahli Madya (Suyanto Edi Wibowo)
			2) Ahli Muda (Jupriadi Putra)
			3) Ahli Muda (Taufan Arisandy)
			4) Ahli Muda (Ni Ketut Citrawati)
			5) Ahli Muda (Zelis Febriani)
			6) Ahli Pertama (Hermi Sari BN)
		Kota Mataram	1) Ahli Madya (Suyanto Edi Wibowo)
			2) Ahli Muda (Ni Ketut Citrawati)
			3) Ahli Muda (Pahittiartik)
			4) Ahli Pertama (Fathin Rodada)
			5) Ahli Pertama (Riki Aditya)
		Kabupaten Dompu	1) Ahli Muda (Jupriadi Putra)
			2) Ahli Muda (Ni Ketut Citrawati)
			3) Ahli Muda (Sitti Afina Desi Suryantini)
			4) Ahli Pertama (Fathin Rodada)
			5) Ahli Pertama (Rio Dwi Nugroho)
			6) Ahli Pertama (Ahmad Muzayyin)
		Kabupaten Bima	1) Ahli Madya (Suyanto Edi Wibowo)
			2) Ahli Muda (Taufan Arisandy)
			3) Ahli Muda (Ni Ketut Citrawati)
			4) Ahli Muda (Zelis Febriani)
			5) Ahli Pertama (Riki Aditya)
5.	Zelis Febriani	Provinsi Nusa Tenggara Barat	1) Ahli Madya (Suyanto Edi Wibowo)
			2) Ahli Muda (Jupriadi Putra)
			3) Ahli Muda (Taufan Arisandy)

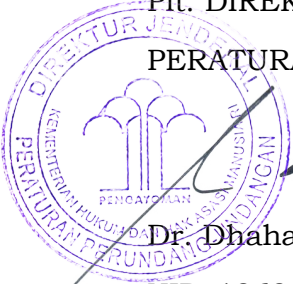
			4) Ahli Pertama (Hermi Sari BN) 5) Ahli Muda (Ni Ketut Citrawati) 6) Ahli Muda (Zelis Febriani)
		Kabupaten Lombok Tengah	1) Ahli Muda (Zelis Febriani) 2) Ahli Muda (Sitti Afina Desi Suryantini) 3) Ahli Pertama (Hermi Sari BN) 4) Ahli Pertama (Ahmad Muzayyin) 5) Ahli Pertama (Prayogi Simatupang) 6) Ahli Pertama (Muhammad Fitrahurrahman Gaffar)
		Kabupaten Lombok Utara	1) Ahli Muda (Jupriadi Putra) 2) Ahli Muda (Zelis Febriani) 3) Ahli Muda (Khairuddin) 4) Ahli Muda (Sitti Afina Desi Suryantini) 5) Ahli Pertama (Fathin Rodada) 6) Ahli Pertama (Ahmad Muzayyin)
		Kabupaten Bima	1) Ahli Madya (Suyanto Edi Wibowo) 2) Ahli Muda (Taufan Arisandy) 3) Ahli Muda (Ni Ketut Citrawati) 4) Ahli Muda (Zelis Febriani) 5) Ahli Pertama (Riki Aditya)
6.	Pahittiartik	Kabupaten Lombok Barat	1) Ahli Madya (Suyanto Edi Wibowo) 2) Ahli Muda (Pahittiartik) 3) Ahli Muda (Khairuddin) 4) Ahli Muda (Baiq Rara Charina) 5) Ahli Pertama (Nyoman Daivi Prakitri Utami)
		Kota Mataram	1) Ahli Madya (Suyanto Edi Wibowo) 2) Ahli Muda (Ni Ketut Citrawati) 3) Ahli Muda (Pahittiartik) 4) Ahli Pertama (Fathin Rodada) 5) Ahli Pertama (Riki Aditya)
		Kabupaten Sumbawa Barat	1) Ahli Madya (Suyanto Edi Wibowo) 2) Ahli Muda (Pahittiartik) 3) Ahli Muda (Baiq Rara Charina) 4) Ahli Pertama (Rio Dwi Nugroho) 5) Ahli Pertama (Nyoman Daivi Prakitri Utami)
		Kota Bima	1) Ahli Muda (Jupriadi Putra) 2) Ahli Muda (Pahittiartik) 3) Ahli Muda (Sitti Afina Desi Suryantini) 4) Ahli Pertama (Rio Dwi Nugroho) 5) Ahli Pertama (Prayogi Simatupang) 6) Ahli Pertama (Muhammad Fitrahurrahman Gaffar)
7.	Khairuddin	Kabupaten Lombok Barat	1) Ahli Madya (Suyanto Edi Wibowo) 2) Ahli Muda (Pahittiartik) 3) Ahli Muda (Khairuddin) 4) Ahli Muda (Baiq Rara Charina) 5) Ahli Pertama (Nyoman Daivi Prakitri Utami)
		Kabupaten Sumbawa	1) Ahli Madya (Suyanto Edi Wibowo) 2) Ahli Muda (Taufan Arisandy) 3) Ahli Muda (Khairuddin) 4) Ahli Muda (Baiq Rara Charina) 5) Ahli Pertama (Hermi Sari BN) 6) Ahli Pertama (Riki Aditya)
		Kabupaten Lombok Utara	1) Ahli Muda (Jupriadi Putra) 2) Ahli Muda (Zelis Febriani) 3) Ahli Muda (Khairuddin) 4) Ahli Muda (Sitti Afina Desi Suryantini)

			5) Ahli Pertama (Fathin Rodada) 6) Ahli Pertama (Ahmad Muzayyin)
		Kabupaten Lombok Timur	1) Ahli Muda (Taufan Arisandy) 2) Ahli Muda (Khairuddin) 3) Ahli Muda (Baiq Rara Charina) 4) Ahli Pertama (Nyoman Daivi Prakitri Utami) 5) Ahli Pertama (Prayogi Simatupang) 6) Ahli Pertama (Muhammad Fitrahurrahman Gaffar)
8.	Sitti Afina Desi Suryantini	Kabupaten Lombok Tengah	1) Ahli Muda (Zelis Febriani) 2) Ahli Muda (Sitti Afina Desi Suryantini) 3) Ahli Pertama (Hermi Sari BN) 4) Ahli Pertama (Ahmad Muzayyin) 5) Ahli Pertama (Prayogi Simatupang) 6) Ahli Pertama (Muhammad Fitrahurrahman Gaffar)
		Kabupaten Dompu	1) Ahli Muda (Jupriadi Putra) 2) Ahli Muda (Ni Ketut Citrawati) 3) Ahli Muda (Sitti Afina Desi Suryantini) 4) Ahli Pertama (Fathin Rodada) 5) Ahli Pertama (Rio Dwi Nugroho) 6) Ahli Pertama (Ahmad Muzayyin)
		Kota Bima	1) Ahli Muda (Jupriadi Putra) 2) Ahli Muda (Pahittiartik) 3) Ahli Muda (Sitti Afina Desi Suryantini) 4) Ahli Pertama (Rio Dwi Nugroho) 5) Ahli Pertama (Prayogi Simatupang) 6) Ahli Pertama (Muhammad Fitrahurrahman Gaffar)
		Kabupaten Lombok Utara	1) Ahli Muda (Jupriadi Putra) 2) Ahli Muda (Zelis Febriani) 3) Ahli Muda (Khairuddin) 4) Ahli Muda (Sitti Afina Desi Suryantini) 5) Ahli Pertama (Fathin Rodada) 6) Ahli Pertama (Ahmad Muzayyin)
9.	Baiq Rara Charina Sizi	Kabupaten Lombok Barat	1) Ahli Madya (Suyanto Edi Wibowo) 2) Ahli Muda (Pahittiartik) 3) Ahli Muda (Khairuddin) 4) Ahli Muda (Baiq Rara Charina) 5) Ahli Pertama (Nyoman Daivi Prakitri Utami)
		Kabupaten Sumbawa Barat	1) Ahli Madya (Suyanto Edi Wibowo) 2) Ahli Muda (Pahittiartik) 3) Ahli Muda (Baiq Rara Charina) 4) Ahli Pertama (Rio Dwi Nugroho) 5) Ahli Pertama (Nyoman Daivi Prakitri Utami)
		Kabupaten Lombok Timur	1) Ahli Muda (Taufan Arisandy) 2) Ahli Muda (Khairuddin) 3) Ahli Muda (Baiq Rara Charina) 4) Ahli Pertama (Nyoman Daivi Prakitri Utami) 5) Ahli Pertama (Prayogi Simatupang) 6) Ahli Pertama (Muhammad Fitrahurrahman Gaffar)
		Kabupaten Sumbawa	1) Ahli Madya (Suyanto Edi Wibowo) 2) Ahli Muda (Taufan Arisandy) 3) Ahli Muda (Khairuddin) 4) Ahli Muda (Baiq Rara Charina) 5) Ahli Pertama (Hermi Sari BN)

			6) Ahli Pertama (Riki Aditya)
10.	Hermi Sari BN	Provinsi Nusa Tenggara Barat	1) Ahli Madya (Suyanto Edi Wibowo) 2) Ahli Muda (Jupriadi Putra) 3) Ahli Muda (Taufan Arisandy) 4) Ahli Muda (Ni Ketut Citrawati) 5) Ahli Muda (Zelis Febriani) 6) Ahli Pertama (Hermi Sari BN)
		Kabupaten Lombok Tengah	1) Ahli Muda (Zelis Febriani) 2) Ahli Muda (Sitti Afina Desi Suryantini) 3) Ahli Pertama (Hermi Sari BN) 4) Ahli Pertama (Ahmad Muzayyin) 5) Ahli Pertama (Prayogi Simatupang) 6) Ahli Pertama (Muhammad Fitrahurrahman Gaffar)
		Kabupaten Sumbawa	1) Ahli Madya (Suyanto Edi Wibowo) 2) Ahli Muda (Taufan Arisandy) 3) Ahli Muda (Khairuddin) 4) Ahli Muda (Baiq Rara Charina) 5) Ahli Pertama (Hermi Sari BN) 6) Ahli Pertama (Riki Aditya)
11.	Fathin Rodada	Kota Mataram	1) Ahli Madya (Suyanto Edi Wibowo) 2) Ahli Muda (Ni Ketut Citrawati) 3) Ahli Muda (Pahittiartik) 4) Ahli Pertama (Fathin Rodada) 5) Ahli Pertama (Riki Aditya)
		Kabupaten Dompu	1) Ahli Muda (Jupriadi Putra) 2) Ahli Muda (Ni Ketut Citrawati) 3) Ahli Muda (Sitti Afina Desi Suryantini) 4) Ahli Pertama (Fathin Rodada) 5) Ahli Pertama (Rio Dwi Nugroho) 6) Ahli Pertama (Ahmad Muzayyin)
		Kabupaten Lombok Utara	1) Ahli Muda (Jupriadi Putra) 2) Ahli Muda (Zelis Febriani) 3) Ahli Muda (Khairuddin) 4) Ahli Muda (Sitti Afina Desi Suryantini) 5) Ahli Pertama (Fathin Rodada) 6) Ahli Pertama (Ahmad Muzayyin)
12.	Riki Aditya	Kabupaten Sumbawa	1) Ahli Madya (Suyanto Edi Wibowo) 2) Ahli Muda (Taufan Arisandy) 3) Ahli Muda (Khairuddin) 4) Ahli Muda (Baiq Rara Charina) 5) Ahli Pertama (Hermi Sari BN) 6) Ahli Pertama (Riki Aditya)
		Kota Mataram	1) Ahli Madya (Suyanto Edi Wibowo) 2) Ahli Muda (Ni Ketut Citrawati) 3) Ahli Muda (Pahittiartik) 4) Ahli Pertama (Fathin Rodada) 5) Ahli Pertama (Riki Aditya)
		Kabupaten Bima	1) Ahli Madya (Suyanto Edi Wibowo) 2) Ahli Muda (Taufan Arisandy) 3) Ahli Muda (Ni Ketut Citrawati) 4) Ahli Muda (Zelis Febriani) 5) Ahli Pertama (Riki Aditya)
13.	Rio Dwi Nugroho	Kabupaten Dompu	1) Ahli Muda (Jupriadi Putra) 2) Ahli Muda (Ni Ketut Citrawati) 3) Ahli Muda (Sitti Afina Desi Suryantini) 4) Ahli Pertama (Fathin Rodada) 5) Ahli Pertama (Rio Dwi Nugroho) 6) Ahli Pertama (Ahmad Muzayyin)
		Kabupaten Sumbawa Barat	1) Ahli Madya (Suyanto Edi Wibowo) 2) Ahli Muda (Pahittiartik)

			3) Ahli Muda (Baiq Rara Charina) 4) Ahli Pertama (Rio Dwi Nugroho) 5) Ahli Pertama (Nyoman Daivi Prakitri Utami)
		Kota Bima	1) Ahli Muda (Jupriadi Putra) 2) Ahli Muda (Pahittiartik) 3) Ahli Muda (Sitti Afina Desi Suryantini) 4) Ahli Pertama (Rio Dwi Nugroho) 5) Ahli Pertama (Prayogi Simatupang) 6) Ahli Pertama (Muhammad Fitrahurrahman Gaffar)
14.	Nyoman Daivi Prakitri Utami	Kabupaten Lombok Barat	1) Ahli Madya (Suyanto Edi Wibowo) 2) Ahli Muda (Pahittiartik) 3) Ahli Muda (Khairuddin) 4) Ahli Muda (Baiq Rara Charina) 5) Ahli Pertama (Nyoman Daivi Prakitri Utami)
		Kabupaten Sumbawa Barat	1) Ahli Madya (Suyanto Edi Wibowo) 2) Ahli Muda (Pahittiartik) 3) Ahli Muda (Baiq Rara Charina) 4) Ahli Pertama (Rio Dwi Nugroho) 5) Ahli Pertama (Nyoman Daivi Prakitri Utami)
		Kabupaten Lombok Timur	1) Ahli Muda (Taufan Arisandy) 2) Ahli Muda (Khairuddin) 3) Ahli Muda (Baiq Rara Charina) 4) Ahli Pertama (Nyoman Daivi Prakitri Utami) 5) Ahli Pertama (Prayogi Simatupang) 6) Ahli Pertama (Muhammad Fitrahurrahman Gaffar)
15.	Ahmad Muzayyin	Kabupaten Lombok Tengah	1) Ahli Muda (Zelis Febriani) 2) Ahli Muda (Sitti Afina Desi Suryantini) 3) Ahli Pertama (Hermi Sari BN) 4) Ahli Pertama (Ahmad Muzayyin) 5) Ahli Pertama (Prayogi Simatupang) 6) Ahli Pertama (Muhammad Fitrahurrahman Gaffar)
		Kabupaten Dompu	1) Ahli Muda (Jupriadi Putra) 2) Ahli Muda (Ni Ketut Citrawati) 3) Ahli Muda (Sitti Afina Desi Suryantini) 4) Ahli Pertama (Fathin Rodada) 5) Ahli Pertama (Rio Dwi Nugroho) 6) Ahli Pertama (Ahmad Muzayyin)
		Kabupaten Lombok Utara	1) Ahli Muda (Jupriadi Putra) 2) Ahli Muda (Zelis Febriani) 3) Ahli Muda (Khairuddin) 4) Ahli Muda (Sitti Afina Desi Suryantini) 5) Ahli Pertama (Fathin Rodada) 6) Ahli Pertama (Ahmad Muzayyin)
16.	Prayogi Simatupang	Kabupaten Lombok Tengah	1) Ahli Muda (Zelis Febriani) 2) Ahli Muda (Sitti Afina Desi Suryantini) 3) Ahli Pertama (Hermi Sari BN) 4) Ahli Pertama (Ahmad Muzayyin) 5) Ahli Pertama (Prayogi Simatupang) 6) Ahli Pertama (Muhammad Fitrahurrahman Gaffar)
		Kota Bima	1) Ahli Muda (Jupriadi Putra) 2) Ahli Muda (Pahittiartik) 3) Ahli Muda (Sitti Afina Desi Suryantini) 4) Ahli Pertama (Rio Dwi Nugroho)

			5) Ahli Pertama (Prayogi Simatupang) 6) Ahli Pertama (Muhammad Fitrahurrahman Gaffar)
		Kabupaten Lombok Timur	1) Ahli Muda (Taufan Arisandy) 2) Ahli Muda (Khairuddin) 3) Ahli Muda (Baiq Rara Charina) 4) Ahli Pertama (Nyoman Daivi Prakitri Utami) 5) Ahli Pertama (Prayogi Simatupang) 6) Ahli Pertama (Muhammad Fitrahurrahman Gaffar)
17.	Muhammad Fitrahurrahman Gaffar	Kabupaten Lombok Tengah	1) Ahli Muda (Zelis Febriani) 2) Ahli Muda (Sitti Afina Desi Suryantini) 3) Ahli Pertama (Hermi Sari BN) 4) Ahli Pertama (Ahmad Muzayyin) 5) Ahli Pertama (Prayogi Simatupang) 6) Ahli Pertama (Muhammad Fitrahurrahman Gaffar)
		Kota Bima	1) Ahli Muda (Jupriadi Putra) 2) Ahli Muda (Pahittiartik) 3) Ahli Muda (Sitti Afina Desi Suryantini) 4) Ahli Pertama (Rio Dwi Nugroho) 5) Ahli Pertama (Prayogi Simatupang) 6) Ahli Pertama (Muhammad Fitrahurrahman Gaffar)
		Kabupaten Lombok Timur	1) Ahli Muda (Taufan Arisandy) 2) Ahli Muda (Khairuddin) 3) Ahli Muda (Baiq Rara Charina) 4) Ahli Pertama (Nyoman Daivi Prakitri Utami) 5) Ahli Pertama (Prayogi Simatupang) 6) Ahli Pertama (Muhammad Fitrahurrahman Gaffar)

Plt. DIREKTUR JENDERAL
 PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN,

 Dr. Dhahana Putra
 NIP. 196909091993031001